

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Public Relation* (PR) menjadi salah satu bagian yang penting dari sebuah perusahaan maupun instansi pemerintahan. Menurut Cutlip et al dalam bukunya *Effective Public Relations* (2006) humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.

Humas dalam pemerintahan atau *Government Public Relation* (GPR) memegang peranan yang sangat penting. Arti peran menurut KBBI adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, partisipasi. Peran humas dalam pemerintahan secara umum hampir sama dengan peran humas pada umumnya, yaitu sebagai komunikator atau perantara antara perusahaan atau institusi dengan publiknya. Komunikasi dalam pemerintahan menurut fungsinya dibagi menjadi dua yaitu *managing staff* dan *managing people*. Menurut Abidin (2016 : 81) komunikasi pemerintah untuk *managing people* merupakan komunikasi eksternal organisasi untuk memberitahukan tentang berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah kepada masyarakat, organisasi-organisasi non-pemerintah, termasuk komunitas atau institusi bisnis, sekaligus mendapatkan informasi dari mereka untuk membuat kebijakan dan peraturan juga informasi tentang dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan atau peraturan tersebut dilanjutkan atau dihentikan, direvisi atau dimodifikasi.

Kementerian Keuangan merupakan salah satu lembaga pemerintah Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian keuangan memiliki Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI) untuk dapat menjadi perantara atau penyalur informasi antara Kementerian Keuangan dan publiknya. Biro KLI bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan manajemen kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan struktur perusahaan, Biro KLI berada dibawah Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang saat ini dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati sejak 27 Juli 2016.

Biro KLI, baru baru ini berhasil meraih *Platinum award* (Juara Umum) di ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2019. AHI adalah ajang kompetisi kinerja humas pemerintah di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah seIndonesia. Pada ajang tersebut, Kementerian Keuangan mendapatkan tujuh penghargaan yaitu:

- 1) Kementerian Terpopuler di Media *Online*
- 2) *Website* PPID Kementerian Keuangan (www.e-ppid.kemenkeu.go.id)
- 3) Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinovatif
- 4) Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik Terinovatif
- 5) Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif
- 6) Pranata Humas Ahli Terbaik dan
- 7) Pranata Humas Terampil Terbaik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Biro KLI memiliki enam bagian yang memiliki tugas masing masing dalam menjalankan kegiatan kehumasannya salah satunya adalah bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara (MHKN). MHKN berperan sebagai fasilitator komunikasi atau perantara komunikasi antara Kementerian Keuangan dan lembaga negara lainnya, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Menurut Siswanto dan Abraham (2016 : 57) peran fasilitator komunikasi berfungsi sebagai tempat keluar masuknya berbagai informasi dari dan untuk masyarakat. MHKN sebagai fasilitator komunikasi diharapkan bisa menjaga komunikasi dua arah antara Kementerian Keuangan dengan DPR RI sehingga informasi yang disampaikan ke DPR RI dan diterima dari DPR RI dapat tersampaikan dengan baik.

Menurut Fahri dan Unde (2018 : 176) Humas berfungsi dalam membangun citra yang positif dimata *audience*-nya dan membangun hubungan baik dengan masyarakatnya. Oleh karena itu MHKN harus mampu menjaga hubungan baik dengan *audience*-nya, dalam hal ini DPR RI. Meskipun Kementerian Keuangan mempunyai andil yang sangat besar dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahunan, mereka tidak bisa melakukan dengan sendirinya. Berdasarkan undang-undang, semua Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang telah dirancang oleh Kementerian Keuangan harus disetujui oleh DPR. Oleh karena itu bagian MHKN harus menjalankan perannya sebagai fasilitator komunikasi antara kementerian keuangan dengan DPR RI dengan baik agar komunikasi dan hubungan antara kedua lembaga ini dapat berjalan dengan baik, karena kerjasama antara kedua lembaga negara ini sangatlah penting dalam berjalanya ekonomi negara dan vital jika tidak berjalan dengan baik.

Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa Peran dan Tugas Bagian MHKN dalam Melaksanakan Hubungan dengan Kelembagaan?
- 2) Bagaimana Prosedur Kerja MHKN dalam Pelaksanaan Rapat Kerja Kementerian Keuangan dengan DPR RI sebagai Fasilitator Komunikasi?
- 3) Apa Tugas MHKN dalam Pelaksanaan Rapat Kerja Kementerian Keuangan Dengan DPR RI sebagai Fasilitator Komunikasi?

Tujuan

Pembahasan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dari apa yang dibahas. Tujuan akan menjawab semua permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut terdapat beberapa tujuan, maka tujuan disusunnya laporan akhir ini adalah :

- 1) Mengetahui Peran dan Tugas MHKN dalam Melaksanakan Hubungan dengan Kelembagaan
- 2) Mengetahui Bagaimana Prosedur Kerja MHKN dalam Pelaksanaan Rapat Kerja Kementerian Keuangan dengan DPR RI sebagai Fasilitator Komunikasi
- 3) Mengetahui Tugas MHKN dalam Pelaksanaan Rapat Kerja Kementerian Keuangan Dengan DPR RI sebagai Fasilitator Komunikasi